

CITRA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM KORAN LOKAL (Analisis Wacana Kritis pada Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja Periode Januari – Desember 2017)

THE IMAGE OF SLEMAN REGENCY GOVERNMENT IN THE LOCAL NEWSPAPER (Critical Discourse Analysis on Kedaulatan Rakyat and Tribun Jogja Of The Januari – Desember 2017 Period)

Oleh: Desy Nurjanah, 14419144024, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
desy879fis@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: analisis wacana Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pandangan koran lokal khususnya SKH Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja sebagai hasil dari kegiatan *media relations* Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana model Teun A. Van Dijk dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini berupa studi dokumen. Objek penelitian adalah citra Pemkab Sleman dilihat dari wacana koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra Pemkab Sleman dari hasil analisis teks pada koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja dalam kurun waktu satu tahun cenderung positif. Citra yang terbangun melalui wacana pemberitaan-pemberitaan pada kedua koran tersebut merupakan jenis citra perusahaan yang meliputi: (1) layanan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; (2) kesejahteraan rakyat yang merujuk pada bidang pendidikan, kesiapsiagaan Pemkab Sleman terhadap penanggulangan bencana, dan peningkatan fasilitas kesehatan; (3) ekonomi yang berfokus pada koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pertanian, dan pariwisata; dan (4) pembangunan yang merujuk pada layanan pemerintah dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur serta fasilitas umum di wilayah Kabupaten Sleman

Kata Kunci: Citra, Analisis Wacana Kritis, Van Dijk, *Media Relations*, dan Surat Kabar Harian.

Abstract

This research aim to determine the image of the Government of Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta in point of view from local newspaper especially Kedaulatan Rakyat and Tribun Jogja as a result from media relations activities in Sleman Regency Government. This research is using qualitative research method of critical discourse analysis of the Teun A. van Dijk model. Research data collection in the form of document studies. The research objects were the images of Sleman Regency Government from the text analysis of Kedaulatan Rakyat and Tribun Jogja newspaper that selected by purposive sampling. The results of this study indicate that the image of Sleman Regency Government from the text analysis results in Kedaulatan Rakyat newspaper and Jogja Tribun within one year tends to be positive. The image that was developed through the discourse in the two newspapers was a type of corporate image which included: (1) government services relating to peace, public order and public protection; (2) people's welfare which refers to the education sector, Sleman Regency Government's preparedness for disaster management, and improvement of health facilities; (3) an economy that focuses on cooperatives, micro, small and medium enterprises, agriculture, and tourism; and (4) development which refers to government services in public facilities, repairing and building infrastructure in the Sleman Regency area. .

Keywords: *image, critical discourse analysis, van Dijk, media relations, newspaper*

PENDAHULUAN

Eksistensi *public relations (PR)* atau hubungan masyarakat (Humas) bagi sebuah organisasi semakin diakui. Hal ini karena menurut *Institute Public Relations (IPR)*, Humas merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*good will*) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya (Jefkins, 2004: 9).

Lembaga swasta dan pemerintah di Indonesia semakin menyadari pentingnya Humas bagi organisasi. Pemerintah Indonesia bahkan mewajibkan keberadaan Humas dalam setiap lembaganya dari tingkat pusat hingga daerah serta membentuk BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat).

Program komunikasi oleh Humas dilakukan secara terencana dan berkesinambungan kepada khalayak internal dan eksternal organisasi. Komunikasi oleh Humas disesuaikan dengan khalayak sasaran dengan tujuan menciptakan win-win solution antara organisasi dengan khalayaknya. Sebagaimana kata Jefkins (2004: 11) bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Humas bersifat terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian.

Selain itu menurut Lattimore dkk (2010: 4) Humas adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian organisasi, membantu mendefinisikan filosofi serta memfasilitasi perubahan organisasi. Maka idealnya Humas berada di manajemen puncak agar dapat ikut serta mengambil keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka membentuk citra positif organisasi. Dimana tujuan utama keberadaan Humas dalam organisasi yakni membangun dan mempertahankan citra positif.

Katz dalam Soemirat dan Ardianto (2004: 123) menyampaikan bahwa citra merupakan cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas. Oleh sebab itu poin penting dalam membentuk citra yakni pandangan pihak lain terhadap diri/organisasi itu sendiri, sehingga citra merupakan hubungan timbal balik antara organisasi dengan pihak lain/khalayak nya. Hubungan timbal balik antara organisasi dengan khalayaknya dapat dilakukan

dengan komunikasi searah (secara massa) maupun dua arah (interpersonal) sehingga menimbulkan pengertian bersama dan opini publik yang *favourable*. Rasa saling pengertian pada gilirannya menciptakan citra perusahaan dan reputasi yang baik (Ruliana, 2014: 182).

Citra organisasi yang dikelola oleh Humas dilakukan dengan komunikasi internal dan eksternal. Menurut Yuliana (2014: 3) komunikasi internal Humas ialah segenap kegiatan yang secara khusus ditujukan pada pihak-pihak dalam lingkungan organisasi seperti karyawan, anggota, pimpinan, dan pemegang saham. Sedangkan komunikasi eksternal yakni komunikasi yang dilakukan oleh Humas kepada khalayak eksternal organisasi seperti masyarakat sekitar, serikat pekerja, wartawan, pelanggan, pemerintah dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk komunikasi eksternal yang dilakukan oleh Humas demi meningkatkan citra organisasi adalah menjalin kerja sama dengan media massa atau disebut *media relations*. Menurut Wardhani (2013: 9) *media relations* adalah aktivitas Humas untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang (*balance*). Praktisi Humas harus mampu membangun reputasi diri yang baik dan dapat dipercaya dikalangan wartawan dengan cara bersikap jujur dan terbuka, memahami media dimana wartawan bekerja, bekerja sama dalam menyedakan suatu materi berita, menyediakan dokumentasi yang baik, serta menyediakan fasilitas verifikasi atas rilis yang diterima wartawan (Jefkins, 2003: 116-117). Adapun tujuan *media relations* adalah menaikkan citra positif suatu perusahaan serta produknya, dan mempengaruhi serta memberitahukan kepada khalayak sasarannya (Bland, Theaker & Wragg, 2001: 52). Sedangkan tujuan utama organisasi yang lebih spesifik dan konkrit akan lebih mudah tercapai setelah organisasi mendapatkan citra yang positif. Pada organisasi pemerintah sebagai lembaga publik, tujuan utamanya yakni kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.

Sebagai salah satu Humas pemerintah di tingkat daerah yang menjalankan *media relations*, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Sleman membagi khalayaknya menjadi dua kelompok besar yakni khalayak internal dan eksternal. Pembagian publik digunakan untuk mengidentifikasi

khalayak sasaran, menetapkan skala prioritas sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya lain, serta menerapkan media dan strategi komunikasi yang sesuai agar pesan yang dikomunikasikan mudah dipahami oleh khalayak (Jefkins, 2004: 86).

Secara garis besar (menurut dokumen DPA-SKPD Kabupaten Sleman tahun 2017) kegiatan Bagian Humas dan Protokol Setda Sleman terbagi dalam dua bidang yakni penyebaran informasi dan keprotokolan. Kegiatan penyebaran informasi banyak dilakukan dengan menjalin *media relations* dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik. Kegiatan *media relations* yang dilakukan cukup beragam, tidak melulu hanya penyebaran informasi. Misalnya kegiatan *gathering* yang melibatkan awak media, atau kegiatan *ngopi bareng* yang sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan penyebaran informasi. Kegiatan-kegiatan keakraban ini dilakukan untuk meningkatkan komunikasi interpersonal hingga pada akhirnya menciptakan rasa saling percaya. Meskipun demikian, perbedaan kepentingan antara Pemda Sleman (melalui Bagian Humas dan Protokol Setda Sleman) dengan organisasi media massa tidak menjadikan gagasan Pemkab Sleman selalu menjadi agenda media massa. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti, terutama mengenai bagaimana citra Pemkab Sleman yang tergambar melalui media massa.

Pada media cetak yang bekerja sama dengan Bagian Humas dan Protokol Setda Sleman, koran *Kedauatan Rakyat* dan *Tribun Jogja* memberikan ruang yang cukup besar pada pemberitaan mengenai Kabupaten Sleman. Meskipun menyediakan ruang yang besar, namun teks yang terdapat pada kedua koran tersebut perlu untuk diteliti lebih lanjut agar dapat mengerti arti sebenarnya dari teks yang ada. seperti percakapan, wawancara, komentar dan ucapan-ucapan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun wacana tersebut tertuang pada naskah

METODE PENELITIAN

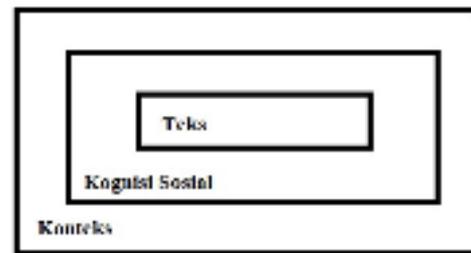
Jenis Penelitian

Penelitian “Citra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Koran Lokal Tahun 2017” merupakan penelitian analisis wacana yang tergambar dalam teks berita surat kabar. Crystal (1987) dalam Eriyanto (2006: 2) menyatakan bahwa wacana memfokuskan pada struktur yang secara alamiah terdapat pada bahasa lisan,

Menurut Eriyanto (2006), ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis

berita, wacana tetap merupakan representasi dari realitas yang ada. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana model Teun A. van Dijk yang biasa disebut sebagai model kognisi sosial. Menurut van Dijk teks seharusnya tidak hanya dilihat dari teks semata, namun juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi dan kelompok kekuasaan dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/pikiran dalam masyarakat berpengaruh kedalam sebuah teks.

Gambar 1 Model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk



Sumber : Eriyanto (2006: 225)

Pada dimensi analisis sosial menyoroti bagaimana praktek kekuasaan (*power*) dan akses (*access*) berpengaruh pada isi media massa sebagai sumber informasi. Kemudian pada dimensi kognisi sosial menekankan bagaimana suatu peristiwa dipahami, didefinisikan, dianalisis dan ditafsirkan kemudian ditampilkan pada suatu model dalam memori. Pada wawancara, model sangat berpengaruh pada tulisan yang ia hasilkan.

Sedangkan pada penelitian ini menekankan pada dimensi teks dimana terdapat tiga elemen wacana. Pertama struktur makro yang menggambarkan makna global suatu teks yang dapat diamati dengan melihat tema teks. Kedua superstruktur yang berhubungan dengan kerangka teks dan bagaimana teks tersusun menjadi suatu berita yang utuh. Kemudian ketiga struktur mikro yang menyoroti makna suatu wacana dilihat dari bagian teks terkecil pada suatu berita berupa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase dan gambar.

wacana. Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivisme-empiris. Oleh penganut aliran ini, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris.

Pandangan kedua, disebut sebagai konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru dianggap sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Pandangan ketiga disebut sebagai pandangan kritis. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada penelitian ini, pandangan yang digunakan adalah pandangan ketiga yaitu paradigma kritis. Hal ini disebabkan karena data pada penelitian ini tidak hanya dianalisis saja namun juga dibandingkan dengan hasil wawancara dengan staf bagian Humas dan Protokol Setda Sleman.

Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kognisi sosial. Pendekatan ini dikembangkan oleh Van Dijk yang melihat wacana bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Oleh karena itu, dengan melakukan penelitian yang komprehensif mengenai kognisi sosial akan dapat dilihat sejauh mana keterkaitan tersebut, sehingga wacana dapat dilihat lebih utuh (Eriyanto, 2006 : 16).

Setting Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis wacana dalam dua koran lokal Yogyakarta mengenai Kabupaten Sleman dan wawancara dengan staf Bagian Humas dan Protokol Setda Sleman. Oleh karena itu tempat penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Waktu untuk analisis wacana koran yang telah dipilih dilangsungkan pada bulan Juli - September 2018.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah citra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pandangan koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015:

240). Dokumen dalam penelitian ini berfungsi sebagai data primer. Adapun dokumen yang digunakan yakni artikel koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja periode Januari - Desember 2017 dengan mengambil dua artikel per bulan per koran yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Serta dokumen pendukung berupa tabel program kerja bagian Humas dan Protokol Setda Sleman tahun 2017.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2014: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis wacana Teun A. van Dijk. Van Dijk menggabungkan tiga elemen yakni teks, kognisi sosial dan konteks sosial menjadi satu kesatuan dalam menganalisis suatu teks.

Menurut Van Dijk (dalam Wodak & Chilton, 2005: 72) memahami wacana bukan sekedar memahami teks semata, namun kita perlu melihat adanya konteks dibalik adanya teks. *Context models* atau konteks sesuai kata Van Dijk, merupakan proses produksi teks wacana disertai konteks dimana komunikasi berlangsung atau dalam situasi tertentu. Proses produksi harus diamati agar dapat diketahui bagaimana suatu teks dimunculkan oleh penulis/wartawan. Selain itu konteks atau situasi dimana teks itu muncul juga perlu diselidiki untuk mengetahui bagaimana reproduksi teks. Perspektif memandang teks tersebut dikenal sebagai analisis wacana kritis.

Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat didalamnya (Eriyanto, 2006: 7). Wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis untuk mengetahui hubungan antara wacana dengan perkembangan sosial budaya dalam dimensi linguistik.

Van Dijk menawarkan suatu gagasan analisis atas wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikenal dengan konsep kognisi sosial (Eriyanto, 2006: 222). Konsep ini memfokuskan kajian pada peran strategis wacana dalam proses distribusi dan reproduksi

Layanan Pemerintah, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan.

Kemudian pada koran Tribun Jogja, berita mengenai Sleman terdapat pada rubrik Jogja Life, Jogja Region, atau Komunikarta. Sama seperti pada koran Kedaulatan Rakyat, pada koran Tribun Jogja juga diambil 24 judul artikel. Namun terdapat beberapa artikel yang tidak sesuai kriteria empat tema yang ditentukan kemudian dimasukkan dalam satu tema lain-lain. Sehingga pada analisis koran Tribun Jogja dibagi dalam lima tema.

Analisis Teks Koran Kedaulatan Rakyat

Van Dijk melihat suatu teks terdiri dari beberapa struktur/tingkatan yang saling mendukung. Tingkatan pertama yakni struktur makro yang merupakan makna umum/global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat tema atau topik berita. Kedua yakni superstruktur, merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun menjadi suatu berita utuh. Ketiga, struktur mikro yakni makna wacana yang dapat dilihat dari bagian terkecil suatu teks baik berupa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase dan gambar. Pada artikel koran Kedaulatan Rakyat dianalisis menggunakan metode yang disebut diatas.

Struktur makro berupa tema pada 24 teks berita koran Kedaulatan Rakyat terdapat empat tema. Keempatnya yakni layanan pemerintah, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan. Adapun rinciannya sebagai berikut: layanan pemerintah sebanyak 6 artikel, kesejahteraan rakyat sebanyak 7 artikel, ekonomi sebanyak 8 artikel, dan pembangunan 3 artikel.

Kemudian superstruktur berupa skema dibagi menjadi dua kategori, yakni *summary* dan *story*. Skema *summary* ketika inti sudah dapat diketahui dari judul dan *lead* berita. Ketika pembaca harus membaca keseluruhan teks maka skema yang digunakan adalah *story*. Pada tema layanan pemerintah, penggunaan skema *story* sebanyak 3 artikel dan 3 artikel lainnya berskema *summary*. Kemudian pada tema kesejahteraan rakyat skema *story* digunakan pada 3 artikel dan 4 *summary* 4 artikel. Artikel bertema ekonomi memiliki 8 skema *summary*. Sedangkan tema pembangunan memiliki 2 judul dengan skema *story* dan 1 judul bertema *summary*. Sehingga total dari 24 judul artikel, 8 judul menggunakan skema *story* dan 16 judul menggunakan skema *summary*.

Contohnya pada artikel 1 pada tema kesejahteraan rakyat dengan judul “SMPN 4 Ngaglik Terlambat Sediakan Genset, Bupati Imbau Sekolah Tidak ‘Gambling’” berskema *story*. Judul artikel langsung merujuk kepada kesalahan salah satu SMP Negeri dalam persiapan ujian. Kemudian didukung dengan latar peristiwa yang disampaikan wartawan pada *lead* berita. Latar “Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMP di Kabupaten Sleman sudah dilakukan jauh hari sebelumnya” menunjukkan bahwa memang seharusnya persiapan UNBK di seluruh Kabupaten Sleman dilakukan jauh-jauh hari & tidak dadakan.

Latar didukung sub-topik seperti terlihat pada kalimat “Sayangnya ada SMP di Sleman yang diduga lalai...” yang menegaskan bahwa kelalaian berasal dari SMP terkait, bukan dari pihak Pemerintah Kabupaten. Setelahnya baru diceritakan pada dua paragraf terakhir mengenai SMP yang melakukan persiapan dengan lancar, sehingga cenderung dikesampingkan pembaca. Pada artikel 1 terlihat wartawan ingin menyampaikan bahwa di Kabupaten Sleman diadakan sidak terhadap persiapan dan pelaksanaan UNBK tingkat SMP. Namun berita yang termuat lebih banyak menampilkan mengenai kelalaian salah satu SMP.

Sedangkan contoh artikel dengan tema *summary* terdapat pada artikel 1 pada tema layanan pemerintah dengan judul “Pendirian The Lost World Castle, Pemdes Kepuharjo Tidak Dilibatkan” misalnya, dari pemilihan kata yang dipakai kita dapat melihat kecenderungan isi artikel. Bahwa artikel tersebut ingin menampilkan bahwa pemerintah setempat sebagai pihak yang tidak bersalah. Kemudian dipertegas pada *lead* berita yang menyatakan bahwa area The Lost World Castle merupakan tanah pribadi sehingga pemerintah setempat tidak dapat berbuat banyak atas polemik yang terjadi.

Kemudian pada struktur mikro semantik elemen latar, detil dan maksud hampir selalu digunakan pada setiap artikel. Hal ini digunakan untuk menekankan makna dalam teks berita. Misalnya artikel 5 pada tema ekonomi, elemen detil yang disampaikan sangat menguntungkan Pemkab Sleman sebagai komunikator. Berita mengenai inovasi pertanian dan perikanan yang disebut minapadi ini lebih banyak memberikan detil mengenai pencapaian dalam proses budidaya minapadi. Terlebih pada artikel diberikan praanggapan pada *lead* “budidaya

mina padi kolam dalam ternyata sangat menjanjikan” yang semakin meyakinkan pembaca bahwa minapadi sangat menguntungkan. Contoh detil pada kalimat “produksi gabah kering punggut yaitu 5,7 ton/ha. Sementara produksi padi sebelum mina padi hanya menghasilkan 4 kuintal saja”. Detil mengenai fakta yang menguntungkan Pemkab Sleman ini kemudian diperkuat dengan pernyataan “saat ini di Sleman terdapat 104 hektare area pengembangan minapadi yang tersebar di 17 kecamatan”.

Contoh penggunaan elemen maksud dalam artikel 3 (layanan pemerintahan) mengenai KTP elektronik yang disampaikan dengan menguraikan bagian yang dianggap sebagai hal positif. Sedangkan hal lain yang sebenarnya tidak kalah penting disembunyikan dan disampaikan pada paragraf terakhir, yakni informasi mengenai pencetakan di kecamatan yang *error* atau *offline* hanya sebagai informasi tambahan dan terkesan kurang penting.

Contoh lainnya penggunaan elemen latar di artikel 1 pada tema pembangunan. Latar diawali dengan praanggapan berikut “tingginya curah hujan akhir-akhir ini banyak menyebabkan talut atau tebing sungai ambrol”. Selain itu dijelaskan bahwa kerusakan dasar sungai dan penggerusan tebing disebabkan oleh derasnya aliran air. Elemen latar digunakan untuk memberikan persetujuan pada apa yang dilakukan Pemkab Sleman melalui DPUP-KP yakni pengerjaan perbaikan dinding sungai yang ambrol.

Pada struktur mikro sintaksis elemen bentuk kalimat, koherensi dan kata ganti sering dijumpai pada semua artikel. Elemen kata ganti sangat efektif untuk membedakan posisi tokoh dalam suatu teks. Misal pada artikel 2 pada tema pembangunan disampaikan beberapa aktor diantaranya wartawan sendiri, warga dan Kepala Desa Wedomartani. Kata ganti yang digunakan oleh wartawan dalam kalimat “berdasarkan pantauan KR...” mewakili organisasi/perusahaan Kedaulatan Rakyat, bukan pribadi wartawan. Kemudian kata ganti orang ketiga digunakan wartawan dalam menyebut warga dan Kepala Desa. Sedangkan pada pernyataan Kepala Desa “nanti akan kita sampakan lagi. Mudah-mudahan segera ada perbaikan” kata “kita” dimaksudkan untuk menyebut Pemerintah Desa (Kepala dan perangkat Desa) Wedomartani Ngemplak.

Sedangkan elemen bentuk kalimat banyak digunakan pada artikel bertema

kesejahteraan rakyat. Bentuk kalimat pada artikel 1 menempatkan Pemkab Sleman yang direpresentasi oleh Bupati sebagai pihak yang aktif. Kalimat aktif bagi Pemkab Sleman ditunjukkan dari judul yakni “...Bupati imbau sekolah tidak ‘gambling’”. Selain itu artikel 1 disampaikan dengan paragraf deduktif. Wartawan menyajikan praanggapan untuk mendukung keseluruhan berita. praanggapan yang dimunculkan berikut “Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMP di Kabupaten Sleman sudah dilakukan jauh hari sebelumnya” merupakan frasa umum yang setelahnya tidak disajikan datanya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “Sayangnya ada SMP di Sleman yang di duga lalai. Salah satunya di SMPN 4 Ngaglik...” digunakan untuk masuk kedalam topik berita mengenai kelalaian SMPN 4 Ngaglik. Setelah itu menuliskan kabar buruk berupa kelalaian SMPN 4 Ngaglik secara dominan terlebih dahulu (paragraf 1, 2, 3) karena bagi media massa, *bad news is a good news*. Baru kemudian menyajikan berita baik (paragraf 4, 5) sehingga berita baik yang disampaikan di akhir berita menjadi kurang menarik perhatian. Koherensi digunakan pada kalimat “sementara pelaksanaan UNBK di SMPN 4 Pakem, meski digelar 3 sesi namun tetap berjalan lancar” di paragraf 5. Koherensi pembeda tersebut dipakai untuk membandingkan dua peristiwa yakni persiapan pelaksanaan UNBK di SMPN 4 Ngaglik dan SMPN 4 Pakem.

Artikel lain yang menampilkan bentuk paragraf deduktif dengan praanggapan yakni artikel 7. Pra-anggapan pada *lead* yang disajikan mengandung makna yang terlalu umum, sehingga pembaca harus membaca keseluruhan berita agar dapat memahami makna teks secara utuh. “Rendahnya minat baca masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman” merupakan premis wartawan untuk mendukung makna teks. Makna teks yang dimaksud adalah inovasi berupa perpustakaan keliling yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Makna teks didukung dengan detil-detil yang menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana inovasi perpustakaan keliling dilaksanakan. Misalnya jawaban pertanyaan apa yakni “... ialah dengan memaksimalkan layanan perpustakaan keliling” pada paragraf 2. “Karena rata-rata kunjungan kami ke PAUD dan SD...” menjawab pertanyaan dimana. Wartawan

menyajikan fakta secara gamblang dan detil untuk mengajak pembaca memahami detil dari dilakukannya kegiatan perpustakaan keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman.

Kemudian struktur mikro stilistik berupa leksikon atau pilihan kata digunakan ketika ingin memberi kesan tertentu pada teks. Elemen leksikon paling menonjol pada artikel bertema layanan pemerintah terdapat pada judul artikel 2. Penggunaan kata “dialihkan” seolah-olah Pemda (dalam hal ini ditangani Satpol PP) kurang bertanggungjawab dalam mengurus pelanggaran *The Lost World Castle*. Terlebih kalimat sebelumnya “batal disidangkan” yang berkonotasi negatif.

Meskipun judul sangat negatif dan provokatif, didalam keseluruhan berita dijelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan jika Pemda yang menuntut melalui Satpol PP, maka pengelola hanya dikenai pelanggaran Perda saja. Beda hal jika dituntut melalui pidana umum maka kemungkinan hukuman akan lebih berat. Maka pada paragraf 5 digunakan kata “dilimpahkan”, bukan dialihkan lagi. Dimana kata dilimpahkan memiliki kesan lebih profesional dan lebih bertanggung jawab.

Contoh lain pada artikel 4 berita bertema ekonomi. Yakni penggunaan kata *gambling* pada artikel berjudul “Akibat Cuaca Tak Menentu, Petani Tembakau Harus Berani Gambling”. Kata *gambling* atau dalam bahasa Indonesia berarti bertaruh digunakan oleh wartawan untuk memberikan kesan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemkab Sleman melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tidak dapat mengontrol hal terkait cuaca (tidak seorang manusia pun yang bisa). Sehingga petani harus berani mengambil resiko dalam bertani tembakau.

Dimana terdapat resiko “saat masa panen sudah masuk musim penghujan dan itu sangat berpengaruh pada proses penjemuran”. Karena jika tembakau “saat proses penjemuran kurang terkena sinar matahari akan berpengaruh pada kualitas” yang menyebabkan harga ikut menurun. Resiko lain yang tidak diceritakan dalam berita yakni adanya kemungkinan bahwa jika tanaman tembakau banyak terkena air hujan, maka kualitas tembakau akan menurun karena kandungan air dalam daun tembakau menjadi lebih banyak dan daun tembakau sulit untuk di olah.

Pada elemen retorik di artikel koran Kedaulatan rakyat, elemen grafis berupa

penggunaan angka sering digunakan, selain itu terdapat foto/visual dan kadang metafora. Penggunaan metafora berupa ungkapan sehari-hari dari suatu kebiasaan masyarakat misalnya digunakan dalam artikel 4 pada tema ekonomi mengenai petani tembakau yang harus berani *gambling*. Metafora terdapat pada kalimat “setiap memasuki musim kemarau kerap dibarengi dengan perubahan pola tanam. Untuk daerah yang kondisi air nya cukup sulit biasanya beralih ke palawija”. Pernyataan tersebut sesuai pernyataan umum sehari-hari yang banyak diketahui orang bahwa setiap musim kemarau, petani biasa menanam palawija.

Elemen grafis angka dan gambar pada artikel bertema kesejahteraan rakyat ditampilkan sebagai berikut. Elemen grafis berupa gambar nampak ditampilkan pada artikel 1. Keterangan gambar yakni “Bupati Sleman memberikan semangat kepada siswa SMPN 3 Ngaglik sebelum ujian dimulai”. Jika dihubungkan dengan judul dan inti berita, nampak elemen grafis kurang sinkron. Hal ini disebabkan karena berita pada artikel 1 lebih banyak membicarakan kelalaian persiapan ujian yang dilakukan SMPN 4 Ngaglik. Sedangkan elemen grafis di atas justru mencitrakan bahwa Pemkab Sleman (direpresentasi oleh Bupati Sleman) memperhatikan dan peduli akan kebutuhan rakyat nya (anak-anak sekolah).

Elemen grafis pada ketujuh artikel dilengkapi dengan angka-angka. Menurut Eriyanto (2006: 258), pemakaian angka-angka mensugestikan kebenaran, ketelitian dan posisi dari suatu laporan. Misalnya berita pada artikel 2 dan artikel 4 yang sama-sama menyampaikan mengenai program pengentasan kemiskinan. Pada artikel 2, Pemkab Sleman yang direpresentasi oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menyampaikan tentang program pengentasan kemiskinan yang sudah dan akan dilakukan Pemkab Sleman. “... Angka Kemiskinan Capai 37.284 KK” pada judul mensugestikan kebenaran bahwa “angka kemiskinan di Kabupaten Sleman tergolong masih tinggi” (pada *lead*). Diikuti dengan penjelasan mengenai persen target penurunan angka kemiskinan tiap tahun “target kami tiap tahunnya ada penurunan 0,67 persen...”. Berikut fakta di lapangan “berdasarkan data... rumah dengan dinding kayu kualitas rendah yang ditinggali 2.237 KK. Selain itu ada 8.000 KK belum menggunakan listrik, 4.500 KK belum menggunakan jamban”. Kesemuanya diberikan penjelasan beserta data/angka untuk

meningkatkan tingkat presisi, sehingga ketika kemudian disampaikan “untuk mengurangi angka kemiskinan ini, Pemkab Sleman telah memiliki beberapa program” maka rencana program ini terkesan lebih mutakhir, karena didasarkan pada data dan fakta.

Sedangkan pada artikel 4 angka-angka dimunculkan untuk memperkuat kritikan dari DPRD Kabupaten Sleman kepada Pemkab Sleman mengenai efisiensi keuangan daerah dan program pengentasan kemiskinan. Aktor di berita menyampaikan “mengingat satu kecamatan yakni Mlati justru meningkat angka kemiskinan dari 10.181 orang menjadi 10.506 orang”. Sedangkan ketika menyampaikan penurunan angka kemiskinan di kecamatan lain hanya dikatakan “... meskipun kecamatan lainnya mengalami penurunan tapi masih relatif kecil” tanpa disertai data/angka. Hal ini menegaskan bahwa wartawan menjelaskan detail info yang menguntungkan komunikator dan menutupi informasi yang sekiranya merugikan komunikator. Selain itu, kalimat “pada tahun 2016 sekitar 96,39 persen dan tahun 2015 sekitar 93,87 persen” digunakan untuk memperjelas kalimat “rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2016, lebih menurun dari tahun 2015” agar terkesan lebih valid.

Analisis Teks Koran Tribun Jogja

Kerangka analisis teks model van Dijk juga digunakan pada artikel koran Tribun Jogja. Struktur makro berupa tema pada artikel koran Tribun Jogja awalnya dibagi menjadi empat tema. Kemudian karena ada satu artikel berjudul “Heri Temukan Dombanya Tewas Tercabik-cabik” yang kurang pas dimasukkan kedalam empat tema, kemudian artikel ini dimasukkan kedalam tema lain-lain. Adapun artikel dengan tema layanan pemerintah berjumlah empat artikel, tema kesejahteraan rakyat sejumlah 10 artikel, tema ekonomi berjumlah 7 artikel serta tema pembangunan sebanyak 2 artikel.

Kemudian pada superstruktur skematik, skema *summary* pada tema layanan pemerintah ada 2 artikel dan 2 artikel lain berskema *story*. Pada tema kesejahteraan rakyat, skema *summary* berjumlah 5 artikel dan *story* 5 artikel. Kemudian pada tema ekonomi, 4 artikel berskema *summary* dan 3 artikel berskema *story*. Pada tema pembangunan, artikel 2 berskema *summary* dan artikel 1 berskema *story*. Sedangkan pada tema lain-lain menggunakan skema *summary*.

Skema pada artikel lain-lain yang berjudul “Heri Temukan Dombanya Tewas

Tercabik-cabik, Hewan Liar Sikat 10 Domba di Pakem” yakni *summary*. Judul tersebut sudah mencerminkan keseluruhan isi artikel. Karena keterangan dari pihak terkait hingga akhir artikel belum dapat menyimpulkan hewan apa yang memangsa ternak warga. Skema *summary* digunakan ketika judul dan *lead* sudah memuat keseluruhan inti berita.

Sedangkan skema *story* biasanya digunakan ketika wartawan menceritakan suatu peristiwa dengan gaya bercerita. Sehingga pembaca baru mengetahui inti berita ketika sudah membaca secara utuh. Misalnya artikel 2 pada tema layanan pemerintah dengan judul “Puluhan PNS Terlambat Masuk Kerja” menceritakan mengenai inspeksi dadakan yang dilakukan oleh Inspektorat Sleman. Judul dan *lead* merupakan simpulan yang diutarakan wartawan. Namun pada paragraf 3 dikatakan bahwa “...secara umum hasilnya SKPD telah melaksanakan apa yang menjadi ketentuan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan pihaknya”. Sehingga latar situasi terlihat ketika membaca berita secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan strategi wartawan yang menempatkan kabar negatif di awal paragraf, sedangkan informasi lainnya yang kurang menguntungkan wartawan diletakkan pada paragraf-paragraf selanjutnya sehingga dianggap kurang penting.

Contoh lain yakni artikel 1 pada tema pembangunan. Pada paragraf 1 dan 2 memaparkan mengenai kesibukan pekerja perbaikan jembatan layang. “Mereka sedang melakukan perbaikan jembatan layang yang berlubang” (paragraf 2). Kemudian wartawan menceritakan kronologis berlubangnya jembatan Kaliabu hingga akhirnya diperbaiki pada paragraf-paragraf selanjutnya. “...lubang jalan nasional itu mulai tampak sejak Minggu (29/1) pagi” (paragraf 3).

Dalam artikel tersebut wartawan menampilkan komentar warga dan keterangan yang didapat dari seorang pekerja perbaikan jembatan. Pada paragraf 8 disampaikan “informasi yang didapatkan seorang pekerja, rencananya area lubang jembatan itu akan dicor ulang”. Melalui skema tersebut, dapat diketahui bahwa wartawan tidak berpihak kepada pemerintah atau pihak terkait.

Kemudian pada struktur mikro semantik terdiri dari beberapa atau keseluruhan elemen baik berupa latar, detail, maksud, pra-anggapan, atau nominalisasi yang kesemuanya berkaitan. Misalnya pada artikel 1 mengenai pengelola The

Lost World Castle yang mengabaikan surat peringatan dari Pemkab Sleman, diawali dengan unsur latar yang mendukung sikap Pemkab Sleman. “Aktivitas wisata di The Lost World Castle masih berlanjut meskipun surat peringatan (SP) kedua telah dilayangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Sleman)” (paragraf 1). Kemudian pada paragraf 2 disampaikan praanggapan “bukannya mematuhi SP dengan menghentikan aktivitas, pihak pengelola masih terus mengoperasikan bangunan itu”.

Setelahnya, wartawan menyampaikan detail mengenai aturan perundangan yang dilanggar pengelola kastil, sikap Pemkab Sleman dan latar belakang kasus kastil ini dari tahun 2013. Misalnya detail mengenai pelanggaran aturan, pada paragraf 3 dijelaskan “...bangunan menyerupai benteng tersebut melanggar ketentuan rencana tata ruang wilayah (RTRW)”. Serta dilanjutkan dengan pernyataan berikut.

“Keberadaan kastel tersebut melanggar Peraturan Bupati (Perbup) No. 20/2011 tentang KRB Gunung Merapi. Serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 70/2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Gunung Merapi”. (Paragraf 4)

Kemudian dilanjutkan dengan sikap Pemkab Sleman atas pelanggaran tersebut dan alasannya disampaikan pada paragraf 6-12. Misalnya pada paragraf 7 dikatakan bahwa “nantinya akan diajukan di pengadilan apakah itu ditutup atau itu dibongkar”. Bahwa “larangan adanya bangunan wisata baru pascaerupsi 2010 itu ditegaskannya semata untuk melindungi masyarakat” (paragraf 12).

Selain komentar yang pro dengan Pemkab Sleman, terdapat pula pendapat yang terkesan ragu-ragu (cenderung kontra) dari warga. “Ya itu menjadi dilema, di salah satu sisi itu memang KRB tapi masyarakat juga butuh untuk peningkatan ekonomi” (paragraf 18). Penyebab pernyataan tersebut diuraikan wartawan pada paragraf 19 “warga Dusun Petung telah mengeluarkan dana untuk pembangunan area wisata tersebut... untuk membangun area parkir, Stonehank atau batu besar yang ditata, dan gapura”.

Dari pernyataan warga tersebut, kemudian wartawan menyampaikan pendapat Sekda Sleman disampaikan dalam paragraf 23 “Saya menduga, warga hanya dimanfaatkan oleh pemilik bangunan itu. Ada upaya membenturkan Pemkab dengan warga...”. Pendapat Sekda

Sleman tersebut mengandung elemen maksud implisit bahwa pendapatnya mengenai upaya pembenturan warga dan Pemkab merupakan dugaan yang belum tentu kebenarannya. Namun oleh wartawan pendapat itu ditulis setelah pendapat warga yang ambigu, sehingga seolah hal tersebut benar adanya. Sehingga dalam artikel 1 jelas bahwa makna yang ingin ditekankan wartawan bahwa ia mendukung (pro) tindakan Pemkab Sleman mengenai penegakan kasus The Lost World Castle.

Contoh lain pada artikel 1 dengan tema kesejahteraan rakyat yang berjudul “Pondasi Beton Robohkan Rumah Agus” menggunakan elemen latar pada *lead* berita. Kalimat “kesibukan tampak terlihat di Dusun Prayan Wetan, Depok, Sleman, Rabu (25/1)” (paragraf 1) menunjukkan latar peristiwa. Latar peristiwa yang ditampilkan berupa kegiatan evakuasi yang dilakukan secara swadaya dibantu relawan. Selain elemen latar, terdapat elemen detail yang menceritakan mengenai kronologis peristiwa tanah longsor yang menimpa rumah Agus dari proses terjadinya longsor hingga penanganan. Salah satu detail terdapat dalam kalimat berikut.

“...beberapa orang yang berada di bagian belakang dan teras depan rumah menjadi saksi detik-detik runtuhnya pondasi itu. Pondasi yang dibuat dari batuan kali langsung menghantam sisi rumah milik Agus” (paragraf 7).

Kemudian terdapat pula elemen maksud pada kalimat-kalimat berikut yang memberikan kesan implisit karena hanya diceritakan sekedarnya. Misal pada paragraf 11 berikut “...longsor juga terjadi di Dusun Bangunrejo Tridadi Sleman”. Selanjutnya pada kalimat pada paragraf 12 berikut “selain longsor, terdapat belasan pohon tumbang akibat diterjang angin kencang yang mengakibatkan dua rumah rusak ringan, serta genangan air di lima titik di wilayah Sleman”. Serta pada penjelasan Pemda Sleman mengenai langkah yang dilakukan pemda pada paragraf 14 berikut.

“Untuk sementara pemerintah memverifikasi dahulu kerusakan melalui tim verifikator. Sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian kepada keluarga yang tertimpa bencana tanah longsor tersebut” (paragraf 14).

Elemen maksud terlihat dari cara wartawan menceritakan peristiwa tanah longsor yang menimpa rumah Agus secara detail, sedangkan musibah lain diceritakan seperlunya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa wartawan

ingin menjadikan longsor yang menimpa rumah Agus sebagai cerita utama yang dianggap dapat menarik perhatian pembaca karena unsur dramatis (saksi mata) sebagai ciri khas. Sedangkan informasi lainnya diceritakan secara singkat pada akhir paragraf sebagai pelengkap karena dianggap kurang bisa menarik perhatian pembaca.

Kemudian pada struktur wacana sintaksis, penggunaan kata ganti, koherensi (termasuk koherensi kondisional, koherensi pembeda, peningkaran dsb) dan bentuk kalimat digunakan bersamaan atau masing-masing sesuai makna yang ingin ditekankan oleh wartawan. Misalnya pada tema ekonomi di artikel 1 yang berjudul “Bupati Pertahankan Lahan Penghasil Pangan” memiliki beberapa elemen koherensi terutama terkait Pemkab Sleman. Koherensi pertama yakni koherensi kondisional dengan kata sambung “dan”. “Potensi alih fungsi lahan akibat pembangunan tidak hanya terjadi di wilayah Bantul yang kini mulai membuka keran investasi pengembangan perumahan” (paragraf 1). Makna kalimat tidak akan berubah apabila kalimat “...yang kini mulai membuka keran investasi pengembangan perumahan” tidak disertakan.

Kemudian elemen koherensi kedua terdapat pada paragraf 5 “...daerah produktif penyangga pangan di Sleman sangatlah penting. Karena itu ia meminta investor yang akan masuk untuk mencermati aturan pemakaian lahan”. Kata penghubung “karena” digunakan untuk menciptakan paragraf yang padu dari hubungan sebab-akibat antara “daerah produktif penyangga pangan” dengan “investor yang akan masuk”. Kemudian koherensi ketiga terdapat pada paragraf 6 “bisa cari informasi dulu ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Bappeda... karena tidak mungkin mengeluarkan izin jika tidak sesuai dengan aturan tata ruang”. Koherensi pada paragraf 6 juga digunakan untuk menandakan hubungan sebab-akibat.

Selain itu, terdapat pula elemen kata ganti “ia” pada kalimat “karena itu ia meminta investor yang akan masuk untuk mencermati aturan pemakaian lahan” (paragraf 5). Kata ganti “ia” merujuk kepada Bupati Sleman, Sri Purnomo. Kata ganti lainnya yang dapat digunakan yakni “dia” dan “beliau”. Kata ganti “beliau” digunakan untuk menyebut kata ganti orang ketiga tunggal dengan kesan menghormati. Kemudian kata ganti “dia” menunjukkan kedekatan dan biasanya bersifat informal. Sedangkan kata ganti “ia”

menunjukkan kedekatan dengan masih mengedepankan kesopanan. Dari makna tersebut, secara tersirat wartawan ingin mengesankan bahwa Bupati Sleman mudah didekati oleh rakyatnya.

Sementara pada struktur mikro stilistik, pilihan kata sangat menentukan pemaknaan suatu teks. Misalnya penggunaan kata “seret” pada artikel 1 (layanan pemerintah) yang terlihat pada judul “Sekda Akan seret pengelola ke Pengadilan”. Kata “seret” merupakan kata yang bermakna kasar dibanding kata lainnya (membawa, menuntut, mengajukan). Kata tersebut menunjukkan bahwa pihak yang menyeret, yakni Pemda Sleman sangat geram terhadap sikap pengelola kastil.

Contoh lainnya yakni artikel 9 pada tema kesejahteraan rakyat, elemen leksikon dari penggunaan kata “*monitoring*” pada judul “Dulzaini Monitoring Jentik di 248 Rumah”. Kata *monitoring* merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang dapat diartikan dengan memantau, mengamati, mencermati, memonitor dan sebagainya. Pada konteks artikel 9, kata *monitoring* pada judul artikel dapat pula diganti dengan kata pemantauan atau pengamatan. Meski demikian digunakan kata *monitoring* sehingga terkesan lebih profesional.

Selain itu, biasanya ketika ada *monitoring*, maka akan diikuti dengan kegiatan evaluasi sehingga kegiatan pemantauan yang dilakukan diikuti dengan tindak lanjut sesuai hasil. Begitu pula pada artikel 9, setelah Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) Kabupaten Sleman melakukan *monitoring*, terdapat evaluasi mengenai angka bebas jentik dan anjuran terkait angka bebas jentik yang masih rendah. Sehingga, penggunaan kata *monitoring* pada artikel 9 mengisyaratkan langkah kerja Tim Pokjnal yang profesional.

Kemudian pada struktur mikro retorik pada setiap artikel di koran Tribun Jogja selalu menggunakan elemen grafis baik berupa gambar, tulisan tebal, atau penggunaan angka. Sedangkan elemen metafora dan ekspresi jarang digunakan. Contohnya pada artikel 4 yang bertema layanan pemerintahan pada artikel 4 banyak terdapat elemen retorik terutama elemen grafis. Artikel mengenai pemusnahan ribuan botol miras di Sleman ini dimuat sebagai berita utama pada halaman 5 koran Tribun Jogja edisi 20 Desember 2017. Selain judulnya yang ditulis besar, terdapat foto dengan *caption* “DIMUSNAHKAN - Pemkab Sleman memusnahkan 5.050 botol minuman beralkohol

hasil operasi yustisi tahun 2017 di Lapangan Pemda Sleman, Selasa (19/2)”.

Dalam foto tersebut diperlihatkan ribuan botol minuman keras yang ditumpuk diatas terpal, sebuah alat berat dan beberapa petugas Satpol PP serta Polisi dan Wakil Bupati Sleman. Selain itu, angka-angka banyak dimunculkan pada artikel ini, misalnya pada paragraf 3 “Hery menjelaskan kegiatan ini wujud penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman no 8 tahun 2007...”. Selain itu penjelasan mengenai detail minol juga menggunakan angka-angka.

“...4,415 botol merupakan minuman beralkohol (minol) tipe A, 311 botol minol golongan B, dan 161 botol minol golongan C. Sebanyak 163 botol minol berupa ciu atau oplosan yang terdiri dari 151 botol, 7 jerigen, dan 5 plastik ukuran setengah kilogram”. (paragraf 5).

Terdapat pula elemen grafis berupa paragraf dengan ukuran huruf lebih besar dan di cetak tebal “kenaikan karena banyak turis wisatawan baik domestik atau mancanegara. Hal ini menyebabkan Sleman menjadi menarik untuk peredaran miras”.

Citra Pemerintah Kabupaten Sleman

Citra Pemerintah Kabupaten Sleman yang nampak pada koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja yakni citra perusahaan. Menurut Jefkins (2004), citra perusahaan merupakan citra keseluruhan organisasi. Hal ini sesuai dengan citra Pemkab Sleman yang meliputi layanan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan lain-lain.

1. Layanan Pemerintah

Wacana yang dibangun dalam artikel pemberitaan pada koran Kedaulatan Rakyat mengenai layanan Pemkab Sleman menggambarkan penegasan yang bernada positif yaitu pemerintah saat ini telah melakukan tugasnya dengan baik dan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Meskipun terjadi krisis, pemberitaan pada artikel mengenai kurangnya jumlah blanko KTP-el tetap disampaikan dengan nada positif, yakni dengan menjelaskan langkah yang diambil pemerintah melalui Disdukcapil dalam pendistribusian KTP elektronik sesuai data siap cetak di setiap kecamatan. Demikian juga artikel lain mengenai peran pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, artikel tersebut menunjukkan bahwa posisi pemerintah dalam menangani konflik di masyarakat menjadi pihak yang benar atau netral.

Sedangkan wacana mengenai layanan pemerintah Pemkab Sleman pada pemberitaan-pemberitaan di koran Tribun Jogja lebih mengarah pada upaya penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Wacana tersebut didukung dengan beberapa sub-topik dan fakta yang tersusun apik menjadi satu kesatuan. Sebagai contoh pada sub-tema “minta solusi terbaik” yang memaparkan paguyuban-paguyuban Desa Wisata Petung yang resah dengan peringatan penutupan The Lost World Castle oleh Pemkab Sleman. Peralnya keberadaan kastil membantu perekonomian warga setempat. Bahkan disampaikan bahwa “warga Dusun Petung telah mengeluarkan dana untuk membangun area wisata tersebut”. Namun, pada akhir artikel disampaikan bahwa “Sekda Sleman, Sumadi, menduga adanya warga yang ikut pengembangan wisata tersebut hanya upaya pemanfaatan oleh pengelola castle” dan bahwa Pemda memiliki pijakan kuat bahwa kawasan tersebut tidak boleh dibangun bangunan. Sehingga pada artikel tersebut nampak jelas bahwa wartawan mendukung keputusan Pemkab Sleman untuk menindak tegas pelanggaran demi ketertiban umum demi melindungi masyarakat.

Selain ketertiban masyarakat, Pemkab Sleman juga menjaga ketertiban aparat sipil negara. Sayangnya, proporsi yang disajikan wartawan antara berita mengenai “kesalahan PNS” dan “9 SKPD secara umum sudah melaksanakan apa yang menjadi ketentuan” sangat tidak berimbang. Wartawan memberikan detail mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan PNS di Pemkab Sleman dan memberi sedikit informasi mengenai capaian Pemkab Sleman.

Selain pencapaian Pemkab Sleman, koran Tribun Jogja juga menampilkan berita mengenai inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan ini yang selanjutnya dapat menjadi landasan masyarakat untuk memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Pemkab Sleman. Ruslan (2012: 76) mengatakan bahwa biasanya landasan citra itu berakar dari “nilai kepercayaan” yang konkretnya diberikan individual dan merupakan pandangan atau persepsi. Proses akumulasi dari kepercayaan yang telah diberikan individu-individu tersebut mengalami suatu proses cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas, yaitu sering dinamakan citra (*image*). Sedangkan wacana yang tergambar dari artikel yang berjudul “Denda Tak Bikin Penjual Miras Jera, 5000 Botol Minuman Beralkohol

Ilegal Dimusnahkan” memberikan citra positif bagi Pemkab Sleman dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman no 8 tahun 2007 tentang pelanggaran pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol.

2. Kesejahteraan Rakyat

Wacana dari pemberitaan di koran Kedaulatan Rakyat mengenai layanan kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh Pemkab Sleman hanya merujuk pada citra di bidang pendidikan. Pada artikel mengenai persiapan UNBK tingkat SMP di Kabupaten Sleman, pemberitaan terfokus pada kelalaian persiapan UNBK di SMPN 4 Ngaglik yang terlambat menyediakan generator set (genset) sehingga menimbulkan kekecewaan Bupati. Meski bernada negatif, pemberitaan tersebut memberikan wacana positif karena masalah yang sangat sederhana sekalipun tetap menjadi perhatian dari kinerja Bupati Sleman.

Hal positif lainnya juga menjadi wacana pada pemberitaan-pemberitaan koran Tribun Jogja, yaitu mengenai kesiapsiagaan Pemkab Sleman terhadap penanggulangan bencana dan kesehatan yang lebih berfokus pada peningkatan fasilitas kesehatan serta peran orang tua dengan 3A yakni asah, asih, asuh. Tema kesehatan tampak kentara pada setiap pemberitaan karena sektor kesehatan memang masih menjadi prioritas pembangunan Pemkab Sleman. Tiga tema lain yang lekat dengan wacana kesejahteraan rakyat adalah wacana mengenai pendidikan, wacana mengenai upaya Pemkab Sleman dalam menanggulangi permasalahan sosial di wilayah Kabupaten Sleman, dan penanganan konflik sosial dan SARA. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tema di bidang pendidikan merupakan tema yang sama-sama diusung oleh kedua media pada wacana yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

3. Ekonomi

Tema umum dari wacana mengenai ekonomi pada pemberitaan di koran Kedaulatan Rakyat merujuk pada koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Kedua tema tersebut menjelaskan penguatan modal dari pemerintah dengan bunga cukup rendah bagi koperasi sehat. Selain itu, koran Kedaulatan Rakyat juga mengusung tema-tema lain dalam wacana ekonomi, yaitu pertanian dan perikanan dan pariwisata.

Sedangkan tema-tema yang diusung oleh koran Tribun Jogja mengenai wacana

ekonomi tak jauh berbeda dengan koran Kedaulatan Rakyat, yakni pertanian dan pariwisata. Tema pertanian merujuk pada permasalahan perijinan alih fungsi lahan pertanian di wilayah Kabupaten Sleman dan pengembangan produk pertanian asli Sleman berupa beras. Sedangkan tema pariwisata merujuk pada pengembangan potensi wisata dan kesenian.

4. Pembangunan

Tema umum yang disajikan dalam wacana mengenai pembangunan pada koran Kedaulatan Rakyat merujuk pada layanan pemerintah dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur serta fasilitas umum di wilayah Kabupaten Sleman. Sebagai contoh perbaikan jembatan kali tepus Dusun Kaliajir Desa Kalitirto Kecamatan Berbah yang rusak akibat banjir dan perbaikan jalan di Dusun Krajan Desa Wedomartani Ngemplak Sleman.

Sedangkan tema yang diusung oleh koran Tribun Jogja dalam wacana mengenai pembangunan adalah perbaikan infrastruktur dan pengembangan pembangunan lokasi-lokasi pariwisata. Sebagai contoh pengembangan pembangunan lokasi wisata Kampung Flory yang merupakan sebuah desa wisata yang menyediakan berbagai bibit tanaman hias dan buah serta menyediakan wisata edukasi pertanian berupa museum tani, dan memberikan kesempatan kepada siswa sekolah kejuruan di jurusan pertanian untuk magang dan belajar.

5. Lain-lain

Selain keempat wacana tersebut di atas, koran Tribun Jogja memiliki tema untuk wacana lainnya yaitu penanganan pemerintah ketika terjadi suatu kejadian luar biasa (musibah) yang dialami oleh warganya. Sebagai contoh penanganan hewan ternak di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang tewas tercabik-cabik oleh hewan buas. Selain kesaksian warga, dijelaskan pula bahwa tindak lanjut dilakukan beberapa pihak berwajib sesuai bidang masing-masing mengidentifikasi dan mengevaluasi kejadian tersebut. Adanya tema tersebut dalam wacana pemberitaan di media cetak menegaskan bahwa citra Pemkab Sleman sebagai sebuah institusi pemerintah yang memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh warganya sudah sangat baik.

Citra Pemkab Sleman yang tergambar melalui wacana di media tidak lepas dari adanya sinergi yang baik antara Humas Pemkab Sleman, para pejabat di lingkungan Pemkab Sleman dan media. Yuliana (2014: 2) mengatakan bahwa

Humas yang sukses akan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif dengan berbagai audiens atau khalayak. Humas Setda Sleman menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan organisasi akan citra positif dan kebutuhan publik eksternal akan transparansi kegiatan institusi pemerintah seperti Pemkab Sleman. Hal ini sesuai dengan pendapat Lattimore dkk (2010:4) yang menyatakan bahwa Humas merupakan sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan organisasi, membantu mendefinisikan filosofi serta memfasilitasi perubahan organisasi.

Tujuan keberadaan Humas disini adalah terciptanya citra positif Pemkab Sleman di kalangan publik eksternal yang sesuai dengan citra yang dibangun oleh Pemkab Sleman. Ruslan (2012: 168) mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan salah satu fungsi pers adalah kekuatan pembentuk opini yang sangat efektif melalui media massa. Hal yang sama

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis wacana pada koran lokal Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja mengenai Pemkab Sleman didapatkan simpulan bahwa wacana mengenai Pemkab Sleman dalam kedua koran bernada positif sehingga meningkatkan citra positif Pemerintah Kabupaten Sleman. Citra Pemkab Sleman yang terbentuk dalam kedua koran merupakan citra perusahaan yang meliputi: (a) layanan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; (b) kesejahteraan rakyat yang merujuk pada bidang pendidikan, kesiapsiagaan Pemkab Sleman terhadap penanggulangan bencana, dan peningkatan fasilitas kesehatan; (c) ekonomi yang berfokus pada koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pertanian, dan pariwisata; dan (d) pembangunan yang merujuk pada layanan pemerintah dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur serta fasilitas umum di wilayah Kabupaten Sleman.

Kemudian citra Pemkab Sleman merupakan jenis citra perusahaan atau citra yang menampilkan keseluruhan organisasi, bukan bertumpu pada orang/layanan tertentu. Hal tersebut dikarenakan keberagaman tema yang terdapat pada artikel. Selain itu, pada banyak kesempatan Pemkab Sleman digambarkan sebagai sebuah organisasi yang mengayomi dan dipercaya rakyat sehingga ketika rakyat memiliki masalah bisa mengandalkan Pemkab Sleman. Kemudian dicitrakan pula bahwa

juga disampaikan Ruliana (2014: 90) bahwa dampak dari pemberitaan media memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pembentukan opini publik dalam waktu yang relatif singkat, sehubungan dengan jumlah pembaca atau audiens yang tersebar di berbagai tempat dan dalam waktu yang bersamaan.

Sebagaimana dikatakan Jefkins (2003: 66) bahwa tujuan organisasi dapat dicapai setelah terciptanya citra yang positif. Tujuan Pemkab Sleman sebagai lembaga pelayanan publik yakni kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Sehingga publik/masyarakat percaya dan mengandalkan Pemkab Sleman dalam menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini nampak misalnya pada artikel mengenai sengketa peternak sapi lereng Merapi dengan perusahaan Sarihusada Generasi Mahardika. Para peternak mendatangi Bupati untuk meminta solusi atas permasalahan tersebut.

Pembacaan koran sebagai sebuah Instansi Pemerintah yang memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan berpijak pada aturan perundangan yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa wacana mengenai Pemkab Sleman pada koran Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja cenderung positif.

Saran

Berdasarkan penelitian “Citra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Koran Lokal (Analisis Wacana Kritis pada Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja Periode Januari – Desember 2017)” peneliti menyampaikan beberapa saran.

Pertama yakni saran bagi Pemkab Sleman dimana penelitian dilakukan dengan menganalisis koran lokal yang bekerja sama dengan Pemkab Sleman dan dikliping oleh Humas Setda Sleman. Pada saat peneliti survey ke Bagian Humas dan Protokol pada 2018, staff Humas mengaku hanya meneliti/ mengkliping/ mengevaluasi berita pada koran cetak. Namun perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan adanya internet membuat informasi bisa muncul dari berbagai arah. Untuk itu seyogyanya Pemkab Sleman mulai mempertimbangkan keberadaan media daring seperti koran online atau sumber informasi lain guna mendukung *Sleman Smart Regency 2021*.

Kedua yakni saran kepada media massa khususnya pada Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja. Fungsi media massa selain sebagai media informasi, hiburan dan pendidikan juga sebagai

kontrol sosial. Oleh karena itu media massa juga disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena menjalankan fungsi kontrol sosial atas tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dalam penelitian ini, sedikit sekali ditemukan kritik terhadap

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu, seyogyanya wartawan lebih berani mengkritik tindakan pemerintah yang kurang tepat agar dapat melaksanakan fungsi kontrol sosial dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, M. L. (2005). *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bland, M., Theaker, A. & Wragg, D. (2004). *Hubungan Media yang Efektif (Edisi Kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- Biagi, S. (2010). *Media Impact: Pengantar Media Massa (9th ed)*. (Terjemahan Mochammad Irfan dan Wulung Wira Mahendra). Jakarta: Salemba Humanika. (Edisi asli diterbitkan tahun 2010 oleh Cengage Learning Asia Singapore 5 Shenton Way).
- Butterick, K. (2013). *Pengantar Public Relations: Teori & Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Cangara, H. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Chilton, P., & Wodak, R. (2005). *A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis*. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing Company.
- Coulson, C., & Thomas. (2005). *Public Relations: Pedoman Praktis untuk PR*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Giddens, A., & Turner, J. (2015). *Social Theory Today*. (Terjemahan Yuli Santosa). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Edisi asli diterbitkan tahun 1987 oleh Polity Press.)
- Gregory, A. (2003). *Public Relations in Practice: A Sector-by-Sector Guide*. New Delhi: Chest Publishing House.
- Heryanto, G.G., & Zarkasy, I. (2012). *Public Relations Politik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Jefkins, F. (2002). *Public Relations (4rd ed)*. (Terjemahan Drs. Haris Munandar). Jakarta: Penerbit Erlangga. (Edisi asli diterbitkan tahun 1992 oleh Pitman Publishing, Co.)
- Jefkins, F. (2004). *Public Relations (5th ed)*. (Terjemahan Daniel Yadin). Jakarta: Penerbit Erlangga. (Edisi asli diterbitkan tahun 1998 oleh Pearson Education Limited United Kingdom)
- Lattimore, D., dkk. (2010). *Public Relations: Profesi dan Praktik (3rd ed)*. (Terjemahan Afrianto Daud). Jakarta: Salemba Humanika. (Edisi asli diterbitkan tahun oleh Mc Graw Hill.)
- Foss, K. A., Littlejohn, S. W. (2009). *Theories of Human Communications (9th ed)*. Jakarta: Salemba Humanika. (Edisi asli diterbitkan tahun 2008 oleh Cengage Learning Asia Singapore 5 Shenton Way).
- McQuail, D. (2012). *Teori Komunikasi Massa McQuail (6th ed)*. (Terjemahan Putri Iva Izzati). Jakarta: Salemba Humanika. (Edisi asli diterbitkan tahun 2010 oleh SAGE Publications Asia-Pacific Singapore 33 Pekin Street)
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Olii, H. (2007). *Opini Publik*. Jakarta: PT Indeks.
- Partao, Z. A. (2006). *Media Relations : Strategi Meraih Dukungan Publik*. Jakarta: PT Indeks.

Ruliana, P. (2014). *Komunikasi Organisasi: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ruslan, R. (2012). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi : Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wardhani, D. (2013). *Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yuliana, N. (2014). *Media Relations*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Relations (GPR) dalam rangka Meningkatkan Citra Indonesia (Nation Branding). Prosiding Seminar Nasional Komunikasi. 1-11.

Internet

www.linguistikid.com/pengertian-analisis-wacana-kritis/ diakses pada 17 Mei 2018 pukul 12.10

Jurnal:

Flora, E. (2014). *Analisis Framing Berita Calon Presiden RI 2014-2019 pada Surat Kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim*. eJournal Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 3, halaman 347-356.

Lubis, E. E. (2012). *Peran Humas dalam Membentuk Citra Pemerintah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 12, No. 1, halaman 1-73.

Putra, I. G. N. (2008). *Konteks Historis Praktek Humas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6 No. 4, halaman 178-190.

Skripsi/Disertasi/Tesis/Artikel Ilmiah:

Hastasari, C. (2012). *Strategi Pencitraan di Lingkungan Internal dan Eksternal Polresta Surakarta*. Tesis Magister, tidak diterbitkan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Wutun, M. (2013). *Analisis Berita Politik tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur di Media Massa Cetak (Studi Analisis Wacana Model Teun A. van Dijk Pada Headline Pemberitaan di Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Ekspres Dalam Perspektif Public Relations Politik Periode Agustus - September 2012)*. Tesis Magister, tidak diterbitkan, Universitas Padjadjaran, bandung.

Prosiding

Dalimonthe, L.N.H. & Kusumawardani, Q.D. (2016). *Cyber Government Public*

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Citra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Koran Lokal
(Analisis Wacana Kritis pada Kedaulatan Rakyat dan Tribun
Jogja Periode Januari - Desember 2017)

Nama : Desy Nurjanah

NIM : 14419144024

Program Studi : Ilmu Komunikasi



Reviewer,

Yogyakarta, 28 Juli 2020

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Drs. Suranto, M.Pd., M.Si.


Chatia Hastasari, S. Sos., M.I.Kom.

NIP. 19610306 198702 1 004

NIP. 19860624 201504 2 003